



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI RETNA SUPRAPTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
3. NHK : 211713

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.340.820.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/170 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 211.440.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/150 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 382.380.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/135 m² di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 362.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 576 m²/576 m² di KLATEN, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/154 m² di KLATEN, WARISAN Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 282.250.000

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 150.000
2. LAINNYA, VISIX SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.550.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.577.612
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.669.197.612
III. HUTANG	Rp.	209.166.675
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.460.030.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.